

## **PENGARUH NILAI ASSET DAERAH, BELANJA MODAL, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

**Yeshika Regina Br Ginting<sup>1</sup>  
Yundy Hafizrianda<sup>2</sup>**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1) Pengaruh nilai aset daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Mamberamo Tengah. 2) Pengaruh belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Mamberamo Tengah. 3) Pengaruh pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Mamberamo Tengah. 4) Pengaruh nilai aset daerah, belanja modal, dan pendapatan asli daerah secara simultan terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Mamberamo Tengah. Metode Analisis yang digunakan untuk menganalisis yaitu: 1) Statistik Deskriptif; 2) Uji Asumsi Klasik; 3) Uji Regresi Berganda; 4) Koefisien Determinasi; 5) Uji F; dan 6) Uji t. Hasil dalam penelitian ini adalah : 1) Nilai signifikansi pada variabel nilai aset sebesar  $0.196 > 0.05$  dengan nilai koefisien beta sebesar 0.294 sehingga menunjukkan nilai aset tidak berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan Kabupaten Mamberamo Tengah. 2) Nilai signifikansi pada variabel belanja modal sebesar  $0.013 < 0.05$  dengan nilai koefisien beta sebesar 0.711 sehingga menunjukkan belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Mamberamo Tengah. 3) Nilai signifikansi pada variabel belanja modal sebesar  $0.027 < 0.05$  dengan nilai koefisien beta sebesar 0.199 menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Mamberamo Tengah.

Kata Kunci : Nilai Aset Daerah, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan

### **PENDAHULUAN**

Pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu aspek kunci dalam upaya pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat lokal. Di Indonesia, pengelolaan keuangan daerah diatur secara ketat melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya keuangan publik. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga menjadi acuan utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Undang-Undang ini mengatur mengenai alokasi dana transfer ke daerah, pendapatan asli daerah, serta kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya (BPK, 2004).

Selain peraturan tersebut, terdapat juga peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan langsung dengan pengelolaan aset daerah, belanja modal, dan pendapatan asli daerah. Misalnya, Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mengenai tata cara pengelolaan keuangan daerah secara umum, termasuk pengelolaan aset daerah.

Telah diketahui bahwa Provinsi Papua hingga tahun 2021 terdiri atas 29 kabupaten/kota yang terbagi Dalam konteks belanja modal, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, mengenai pendapatan asli daerah, terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD yang

---

<sup>1</sup> Alumni Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

<sup>2</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

memberikan arahan mengenai penentuan, pemungutan, dan pengelolaan pendapatan asli daerah (Permendagri, 2023).

Menurut Halim dalam (Magdalena dan Kurniawan 2013), kinerja keuangan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengkaji kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti belanja daerah, penerimaan daerah, tingkat kekayaan daerah. Semestinya semakin tinggi penerimaan pendapatan daerah maka semakin besar pula kemampuan keuangan yang dimiliki daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Ati et al. 2023).

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa faktor kunci yang memiliki pengaruh signifikan, antara lain nilai aset daerah, belanja modal, dan pendapatan asli daerah. Nilai aset daerah mencerminkan kekayaan dan potensi pembangunan suatu daerah, sementara belanja modal merupakan investasi dalam infrastruktur dan aset produktif lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi (Ayu Rohanda and Azhar 2023) Belanja modal merupakan perkara yang sangat penting bagi pemerintah daerah karena dapat meningkatkan produktivitas perekonomian sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan semakin besar alokasi belanja modal pada tahun selanjutnya. Hal ini akan memberi dampak yang baik terhadap pertumbuhan kinerja keuangan dari tahun ketahun secara terus-menerus. Suatu daerah untuk menambah aset tetap daerahnya dapat berupa pembangunan infrastruktur sebagai sarana untuk pelayanan publik, Maka pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam anggaran pendapatan belanja daerahnya, Sehingga pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan yang bersifat retribusi dan pajak atas infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayan publik tersebut sebagai upaya dalam meningkatkan PAD (Pamungkas and Arifin 2021).

Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber utama dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. PAD memegang peranan yang sangat penting, karena dapat melihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Pemerintah dapat menggenjot PAD melalui pungutan yang bersifat retribusi dan pajak atas infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayan publik yang bersumber dari dana yang telah dialokasikan dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Sehingga pemerintah daerah secara terus-menerus dapat memacu pertumbuhan kinerja keuangannya. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah. Kabupaten Mamberamo Tengah, dengan potensi sumber daya alam dan ekonomi yang besar, membutuhkan strategi yang tepat dalam mengelola nilai aset daerah, belanja modal, dan pendapatan asli daerah guna mendukung keberlanjutan keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa nilai aset berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (N. M. D. P. Sari and Mustanda 2019), belanja modal yang bila dilihat pengaruhnya terhadap kinerja keuangan memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (Ayu Rohanda and Azhar 2023). Akan tetapi pada penelitian Andirfa, et.al (2016) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sementara pada penelitian Darmayanti (2019) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

Kabupaten Mamberamo Tengah, sebagai bagian dari Papua yang kaya akan sumber daya alam dan potensi pembangunan, menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengelola keuangan daerahnya. Penggunaan yang efisien dan efektif terhadap sumber daya keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan suatu pemerintah daerah dapat dinilai dari bagaimana mereka menyusun dan melaksanakan APBD mereka. APBD yang baik mencerminkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, serta alokasi sumber daya yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Kinerja yang baik dalam hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil mengoptimalkan pendapatan serta mengalokasikan dana dengan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 1. Nilai Pendapatan Asli Daerah**

Tahun	PAD
2013	Rp 10,875,939,113
2014	Rp 13,916,753,684
2015	Rp 14,203,916,412
2016	Rp 14,380,797,668
2017	Rp 10,185,211,897
2018	Rp 7,279,453,267
2019	Rp 21,037,018,637
2020	Rp 10,543,442,187
2021	Rp 9,757,380,072
2022	Rp 9,746,955,236

Tabel diatas menunjukkan fluktuasi nilai pendapatan asli daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dari tahun ke tahun. Terdapat peningkatan nilai dari tahun 2013 hingga mencapai puncak pada tahun 2019, diikuti oleh penurunan tajam pada tahun 2020 dan 2021, lalu sedikit stabil pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi rentan terhadap faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah atau kondisi ekonomi global seperti pandemi COVID. Penurunan yang signifikan pada tahun 2020 akibat dari pandemi COVID-19 menyoroti pentingnya kesiapan dalam menghadapi krisis. Kabupaten Mamberamo Tengah perlu memperkuat sistem keuangan dan ekonomi yang dapat menahan gejolak eksternal dan memberikan dukungan yang efektif kepada masyarakat dan sektor-sektor yang terdampak dalam situasi darurat seperti pandemi.

Meskipun terjadi fluktuasi, terlihat bahwa PAD mencapai puncaknya pada tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, terdapat peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut, yang bisa disebabkan oleh faktor seperti kebijakan pajak yang efektif atau pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu. Adanya perubahan yang signifikan antara tahun-tahun tertentu menunjukkan perlunya kebijakan yang konsisten dan terencana dengan baik untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## **METODE ANALISIS**

### **1. Statistik Deskriptif**

Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, dan sebagainya. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah nilai aset, belanja modal, pendapatan asli daerah, dan kinerja keuangan.

### **2. Uji Asumsi Klasik**

#### **a) Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Bila data berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik berjenis parametrik. Sedangkan bila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik non parametrik. Jika nilai nilai sig. > 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal. Uji kolmogorov-smirnor dikatakan normal apabila nilai signifikansi >  $\alpha$  (0,05), (Ismail, 2018).

## b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas dalam suatu penelitian memiliki unsur-unsur yang sama. Uji multikolinearitas pada model regresi dapat ditentukan berdasarkan nilai Tolerance (toleransi) dan nilai Variance Inflation Factor (VIP). Jika nilai VIF kurang dari 10 ( $VIF < 10$ ) maka variabel-variabel bebas yang akan diuji tidak memiliki gejala multikolinearitas. Jika nilai VIF lebih dari 10 ( $VIF > 10$ ) maka variabel-variabel bebas yang akan diuji memiliki gejala multikolinearitas (Ismail, 2018).

## c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Analisis heteroskedastisitas menggunakan uji grafik scatterplot. Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati pola tertentu pada grafik scatterplot, dimana jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar dan menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas (Ismail, 2018).

## d) Uji Otokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul akibat observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Untuk data time series autokorelasi sering terjadi. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Watson.

## 3. Uji Regresi Berganda

Untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan terdiri dari kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen, sedangkan peran teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan peran internal audit sebagai variabel independen.

Bentuk umum dari perumusan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu$$

Keterangan:

Y	: Kinerja Keuangan Daerah
X1	: Nilai Aset
X2	: Belanja Modal
X3	: Pendapatan Asli Daerah
$\beta$	: Nilai Koefisien Regresi
$\alpha$	: Nilai intercept

## 4. Koefisien Determinasi

R<sup>2</sup> seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi berkisar dari nol sampai dengan satu ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Apabila nilai koefisien determinasi mendekati nilai 1 berarti indikator yang digunakan menunjukkan semakin kuat pengaruh variabel X terhadap Variabel Y. Hal ini berarti bila  $R^2 = 0$  menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R<sup>2</sup> semakin besar terhadap variabel dependen dan bila R<sup>2</sup> semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

5. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui semua variabel independen atau bebas yang akan dimasukkan dalam model yang mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Nilai F dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikan sebesar 5%. Adapun kriteria yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

- a) Jika nilai F hitung > F table maka H0 ditolak dan menerima Ha, artinya terdapat pengaruh yang simultan antara variabel independen dan variabel dependen.
- b) Jika nilai F hitung < F maka H0 diterima dan menolak Ha, artinya tidak terdapat pengaruh yang simultan antara variabel independen dan variabel dependen.
- c) Jika probabilitas (sig t) > α (0,05) maka H0 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan jika probabilitas (sig t) < α (0,05) maka H0 ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen

6. Uji t

Menurut Ghozali dalam (Jauharriah 2022) Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap dependen. Pada uji statistik t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan t tabel, dengan cara sebagai berikut:

- a) Bila t hitung > ttabel atau probabilitas < tingkat signifikan (sig < 0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b) Bila thitung < ttabel atau probabilitas > tingkat signifikan (sig < 0,05), maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Uji Asumsi Klasik**

Dalam penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji otokorelasi terhadap data.

a) Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi tersebut memiliki distribusi yang normal atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Berikut hasil uji normalitas variabel Kinerja Keuangan Daerah (EFI), Belanja Modal (BMD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Aset Daerah (NAS).

**Tabel 2. Uji Normalitas Variabel  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		EFI	PAD	BMD	NAS
N		10	10	10	10
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	95.0520	12.1940	318.3130	2195.7560
	Std. Deviation	5.51420	3.86662	123.10334	488.00970
Most Extreme Differences	Absolute	.215	.233	.173	.252
	Positive	.215	.233	.173	.252
	Negative	-.177	-.164	-.151	-.183
Test Statistic		.215	.233	.173	.252
Asymp. Sig. (2-tailed)		<b>.200<sup>c,d</sup></b>	<b>.132<sup>c</sup></b>	<b>.200<sup>c,d</sup></b>	<b>.072<sup>c</sup></b>

a. Test distribution is Normal.

- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel output SPSS di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi asymp. Sig. (2-tailed) pada setiap variabel (EFI, PAD, BMD, NAS) lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, dapat disimpulkan bahwa semua variabel yaitu efisiensi, PAD, belanja modal dan nilai aset dibentuk berdasarkan runtutan data yang berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi pada suatu variabel ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0.10 maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.

**Tabel 3. Uji Multikolinearitas**

		Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	74.3842	6.3476		11.7185	2.3296E-5		
	PAD	.2867	.2877	.2010	.9964	.3575	.9614	1.0402
	NAS	.0032	.0023	.2815	1.3760	.2180	.9351	1.0694
	BMD	.0320	.0093	.7146	3.4507	.0136	.9124	1.0960

a. Dependent Variable: EFI

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan variabel-variabel bebas mempunyai tolerance lebih besar dari 0,1 yaitu PAD = 0,9614; NAS = 0,9351; dan BMD = 0,9124, ini artinya tidak ada korelasi antar variabel bebas. Hasil perhitungan VIF (Variance Inflation Factor) juga menunjukkan masing-masing variabel bebas memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10, yaitu PAD = 1.0402, NAS = 1.0694, dan BMD = 1,0960. Berdasarkan seluruh hasil pengujian tersebut maka disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel bebas.

c) Uji Heteroskedastitas

Uji heteroskedastitas digunakan untuk menguji apakah terjadi kesamaan varian yang residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Glejser. Jika signifikansi > 0,05 maka dapat dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas.

**Tabel 4. Uji Heteroskedastitas**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3.0701	3.6187		.8484	.4288
	PAD	-.0942	.1640	-.2266	-.5741	.5867

NAS	-.0005	.0013	-.1403	-.3507	.7378
BMD	.0035	.0053	.2690	.6640	.5313

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel PAD sebesar 0,5867, NAS sebesar 0,7378, dan BMD sebesar 0,5313. Oleh karena semua nilai signifikansi ketiga variabel tersebut lebih besar dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji Glejser, disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

d) Uji Otokorelasi

Asumsi autokorelasi hanya diujikan pada data yang bersifat time series atau data cross-sectional yang memiliki pola urutan yang baku antar pengamatan. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Watson, memakai ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika nilai d (durbin watson) lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hipotesis nol ditolak, yang berarti ada autokorelasi.
2. Jika nilai d (durbin watson) terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika nilai d (durbin watson) terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

**Tabel 5. Uji Otokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.8748 <sup>a</sup>	.7652	.6478	3.2723	1.8599

a. Predictors: (Constant), BMD, PAD, NAS

b. Dependent Variable: EFI

Berdasarkan tabel Distribusi Durbin Watson pada level of significant sebesar 5%, jumlah variabel independent sebanyak 3 dan jumlah data sebanyak 10 ditemukan DW(k=3; N=10) pada rentang dL = 0,5252 dan dU = 2,0163. Oleh karena nilai Durbin-Watson (d) model regresi adalah sebesar 1,8599, berarti nilai Durbin Watson (d) regresi berada di antara nilai dL dan dU atau  $dL < d < dU$  ( $0,5252 < 1,8599 < 2,0163$ ). Berdasarkan pengambilan keputusan dalam uji durbin watson di atas, jika nilai d (durbin watson) terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Untuk itu dapat juga dinyatakan bahwa tidak terjadi kasus autokorelasi pada model regresi.

e) Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui arah pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Dalam hal ini persamaan regresi linier berganda yang diuji sebagai berikut:

$$EFI = b_0 + b_1 PAD + b_2 NAS + b_3 BMD + e$$

Dimana :

EFI : kinerja keuangan daerah yang diukur dengan Efisiensi (dalam persen)

PAD : nilai Pendapatan Asli Daerah (dalam milyar rupiah)

NAS : nilai Asset Daerah (dalam milyar rupiah)

BMD : nilai Belanja Modal Daerah (dalam milyar rupiah)

b1, b2 , b3 : koefisien regresi

b0 : intersep

e : disturbance error (variabel gangguan acak)

Hasil pengolahan data menggunakan SPSS menunjukkan model regresi berganda yang diuji sebagai berikut.

**Tabel 6. Regresi Linier Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	74.3842	6.3476		11.7185	0.0000
PAD	0.2867	0.2877	0.2010	0.9964	0.3575
NAS	0.0032	0.0023	0.2815	1.3760	0.2180
BMD	0.0320	0.0093	0.7146	3.4507	0.0136

a. Dependent Variable: EFI

**2. Pembahasan**

a) Pengaruh Nilai Aset Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel nilai aset sebesar  $0.2180 > 0.05$  dengan nilai koefisien beta sebesar 0.2010. Hal ini menunjukkan bahwa nilai aset tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Andelline (2018) yang menyatakan bahwa nilai aset tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Nilai aset aset tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dikarenakan ketika suatu instansi sedang mengalami pertumbuhan aset, dengan adanya pertimbangan ini instansi akan memilih untuk mempertahankan kinerja keuangannya daripada untuk meningkatkannya dimana hal tersebut dapat menimbulkan risiko seperti kerugian yang diakibatkan jika peningkatan kinerja tidak berbanding lurus dengan jumlah aset yang diperoleh oleh instansi tersebut.

Selain itu hasil ini menjelaskan bahwa instansi besar yang memiliki jumlah aset yang tinggi tidak selalu dapat menghasilkan peningkatan kinerja keuangan ketika aset tersebut tidak dikelola secara produktif untuk menghasilkan keuntungan. Di sisi lain, instansi kecil dengan aset yang tidak terlalu besar tetapi mampu mengoptimalkan pengelolaan aset yang dimilikinya secara efisien akan dapat berkontribusi pada pencapaian kinerja keuangan pemerintah (Rahman 2020).

b) Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel belanja modal sebesar  $0.0136 < 0.05$  dengan nilai koefisien beta sebesar 0.7146. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa kenyataan Pemerintah Daerah dengan semakin meningkatnya alokasi belanja modal, maka semakin tinggi kinerja keuangan daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lathifa & Haryanto (2019) bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi diberbagai sektor dan produktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya dapat terjadi peningkatan pertumbuhan kesejahteraan. Meskipun belanja modal penting untuk pembangunan jangka panjang, pengeluaran yang besar bisa meningkatkan defisit fiskal dan utang pemerintah. Penting untuk menjaga keseimbangan antara investasi jangka panjang dengan stabilitas fiskal jangka pendek. Evaluasi yang cermat diperlukan untuk memastikan belanja modal tidak mengorbankan stabilitas keuangan pemerintah. Proyek-proyek besar harus dipilih dengan cermat dan dikelola secara efisien agar manfaat jangka panjangnya dapat diwujudkan. Evaluasi dampak, pengelolaan biaya, dan perencanaan yang matang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan belanja modal tersebut.

c) Pengaruh PAD Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel belanja modal sebesar  $0.2180 > 0.05$  dengan nilai koefisien beta sebesar 0.2010. Hal ini menunjukkan bahwa

pendapatan asli daerah tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2020) bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kabupaten Mamberamo Tengah, sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) seringkali menjadi sumber utama pendanaan bagi daerah ini. Ketergantungan yang tinggi pada dana transfer menyebabkan PAD memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap kinerja keuangan secara keseluruhan. (Bappeda, 2020).

Struktur ekonomi Kabupaten Mamberamo Tengah yang didominasi oleh sektor-sektor yang belum berkembang sepenuhnya, seperti pertanian subsisten dan sektor informal, juga berkontribusi pada rendahnya PAD. Daerah ini memiliki potensi ekonomi yang belum tergali sepenuhnya, sehingga PAD yang dihasilkan tidak cukup untuk memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Efisiensi pengelolaan keuangan di Kabupaten Mamberamo Tengah juga berperan dalam menentukan kinerja keuangan. Jika pengelolaan anggaran tidak efisien, misalnya akibat dari mismanagement atau kebijakan pengeluaran yang tidak tepat sasaran, maka meskipun PAD tinggi, kinerja keuangan tetap tidak akan optimal.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah jelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Nilai signifikansi pada variabel nilai aset sebesar  $0.196 > 0.05$  dengan nilai koefisien beta sebesar 0.294 sehingga menunjukkan nilai aset tidak berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan Kabupaten Mamberamo Tengah. 2) Nilai signifikansi pada variabel belanja modal sebesar  $0.013 < 0.05$  dengan nilai koefisien beta sebesar 0.711 sehingga menunjukkan belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Mamberamo Tengah. 3) Nilai signifikansi pada variabel belanja modal sebesar  $0.027 < 0.05$  dengan nilai koefisien beta sebesar 0.199 menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Mamberamo Tengah.

### **2. Saran**

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini antara lain; a) Bagi Instansi Kabupaten Mamberamo Tengah diharapkan meninjau dan melakukan evaluasi proses penyusunan anggaran setiap periodenya dan menerapkan pengawasan yang lebih ketat, lebih memperhatikan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai. b) Bagi Peneliti Selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama diharapkan untuk lebih mendalam mengenai Kinerja Keuangan pada Kabupaten Mamberamo Tengah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat daripada penelitian oleh penulis.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Muntu, Ika Maya Sari, and Yuliana Amelia N. 2022. "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 7(1): 9–18.
- Ardelia, Ika Novita, Hilda Kumala Wulandari, Yenny Ernitawati, and Dumadi Dumadi. 2022. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020." *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 7(1): 60–80.
- Ati, Clarisa Sukmaning, Imam Baidlowi, Nur Ainayah, and M. Bahril Ilmiddaviq. 2023. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II Di Provinsi Jawa Timur Periode 2018-2022." *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)* 1(4): 110–18. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i4.1994>.
- Ayu Rohanda, and Iqlima Azhar. 2023. "PENGARUH BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH (Studi Pada Kabupaten Aceh Tamiang)." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra* 4(5): 287–301.
- Behn, Robert D. 2003. "Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures." *Public Administration Review* 63(5): 586–606. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1540-6210.00322> (May 5, 2024).
- Bappeda. (2020). Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. Retrieved from Bappeda Kabupaten Mamberamo Tengah.
- BPK. (2004). Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004. Retrieved from Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- BPK. 2006. "Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah." : 1–73. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>.
- Chrisnadwiheryanti, Wahidahwati, & Suryono, B. (2019). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*.
- Diana, S. I. (2020). Pengaruh Ukuran Daerah, Pajak Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2018). Jakarta.
- Djuniar, Lis, and Ida Zuraida. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Belanja Modal Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan." *BALANCE Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 3(2): 445.
- Fathah, Rigel Nurul. 2017. "Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul." *Jurnal EBBANK: Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis dan Perbankan* 8(1): 33–48.
- Hasan, A. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Gowa. Skripsi.
- Ismail, I. (2018). Metodologi Penelitian. Makassar: Gunadarma Ilmu.
- Jauharriah, Mia. 2022. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2021." Skripsi Jurusan Akuntansi FEB Universitas Pakuan Bogor: 1–63.

- Ketike, Remang. 2018. "Analisis Kinerja Dinas Pengelotaan Keuangan Daerah Di Bidang Pendapatan Pada Kabupaten Gayo Lues." (1): 9.
- Magdalena, Marisa, and Ch.Heni Kurniawan. 2013. "Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Di Indonesia." 25(1): 91–106.
- Nasution, Nina Andriany, M Si, Fitri Yani Panggabean, and M Si. 2017. "Vol. 8 No.1 Juli 2017." 8(1): 1–19.
- Nurul Sukma Handayani. 2019. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Kalimantan Timur." : 1–12. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pengertian-keuangan-daerah-7229819c/detail/>.
- Pamungkas, W S D, and A Arifin. 2021. "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019." [http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/92992%0Ahttp://eprints.ums.ac.id/92992/1/NASKAH\\_PUBLIKASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/92992%0Ahttp://eprints.ums.ac.id/92992/1/NASKAH_PUBLIKASI.pdf).
- Pradana, Z. G. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal, Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019). Skripsi.
- Putri, E. D. (2016). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 1-14.
- Putri, R. A. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah daerah, PAD, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-20.
- Rahman, Muhammad Arya. 2020. "Pengaruh Struktur Modal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Jakarta Islamic Index (JII)." *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* 3(1): 55–68.
- Ratnasari, Dwi, and Dianita Meirini. 2023. "Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Silpa Dalam Pengaruhnya Kinerja Keuangan." *Jurnal Akuntansi* 17(1): 38–47.
- Ridho, I. T. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Legislatif, dan Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia). Skripsi.
- Saleh, Rahmat. 2020. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* 15(2): 111–34.
- Sari, Indah Puspa. 2016. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kab/Kota Pulau Sumatra)." *Journal Of Management* 3(1): 679–92.
- Sari, Ni Made Diah Permata, and I Ketut Mustanda. 2019. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 8(8): 4759.
- Surastowo. 2019. "Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur." *Jurnal Simplex* 2(3): 175–85.
- Wahyuningsih, Yoshinta Endah. 2016. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Naskah Publikasi." : 17.
- Wensen, Arthur Kleanfi, Arie F. Kawulur, and Cecilia Kewo. 2021. "Analisis Pengukuran Nilai Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Minahasa." *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)* 2(1): 30–40.